



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 15 (lima belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 13 November 2024
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI. 2. Penjelasan Ketua Dewas dan Dirut BPJS Kesehatan terhadap Program Kerja Tahun 2025.
Ketua Rapat	: drg. Putih Sari /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI 33 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI B. Pemerintah - Dewan Pengawas BPJS Kesehatan beserta jajaran. - Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 14.26 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sistem pelayanan yang lebih inklusif, melalui:
 - a. melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai dampak Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) terhadap akses dan kualitas pelayanan,
 - b. meningkatkan mekanisme pendampingan, pengawasan dan pengendalian potensi terjadinya fraud di faskes sedini mungkin,
 - c. memastikan perlakuan yang adil dan non-diskriminatif terhadap peserta BPJS Kesehatan dan pasien mandiri serta memperbaiki sistem antrian untuk menghindari kesenjangan layanan,
 - d. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI terkait program skrining kesehatan untuk memastikan program dapat berjalan efektif,
 - e. memasukkan layanan terapi rehabilitasi psiko-sosial dan layanan kejiwaan ke dalam program JKN, dan
 - f. memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah terkait memastikan cakupan kepesertaan PBI-APBD.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk mencari alternatif solusi terkait permasalahan tunggakan dari peserta JKN yang menghambat layanan, termasuk mengkaji kemungkinan pemberian kelonggaran pembayaran atau opsi lain yang tidak memberatkan bagi peserta yang tidak mampu.
3. Komisi IX DPR RI meminta penjelasan lengkap tentang dana investasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, termasuk alokasi dan keuntungan yang diperoleh secara tertulis.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Kesehatan meningkatkan pengawasan dan memastikan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan yang transparan dan akuntabel, guna menjaga keberlanjutan program JKN dan mengurangi risiko finansial yang dapat mempengaruhi layanan.
5. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota pada rapat hari ini dan disampaikan kepada Komisi IX DPR RI paling lambat Rabu, 20 November 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

Jakarta, 13 November 2024

KETUA RAPAT,

drg. PUTIH SARI
A-100

KETUA DEWAS BPJS KESEHATAN



Prof. dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.THT-BKL

DIRUT BPJS KESEHATAN



Prof. dr. ALI GHUFRON MUKTI, M.Sc., PhD,AAK